

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:
KAMILATURRIFDA
2210113159
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Aria Zurnetti, SH., M.Hum

Dr. Nani Mulyati, SH., M.Cl

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg: 62/ PK. IV/IV/2026

**PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)**

THE IMPLEMENTATION OF STATE FINANCIAL LOSS RECOVERY IN CORRUPTION
(Case Study at The Padang District Attorney's Office)

Disusun Oleh:
Author:

Kamilaturrifda
NIM: 2210113159

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK VI)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP VI)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 August
2026 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Minor Thesis was Defended in The Comprehensive Examination Session on August 26th 2026
and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

Dekan
Dean



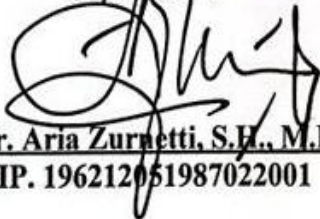
Prof. Dr. Ferdi, S.H., M. Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 19820809005012002

Pembimbing I
Supervisor I



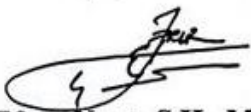
Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001

Pembimbing II
Supervisor II



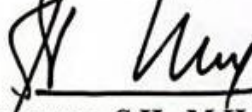
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 19820809005012002

Penguji I
Examiner I



Efren Nova, S.H., M.H.
NIP. 19611011987022001

Penguji II
Examiner II



Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

	No. Alumni Universitas		Kamilaturrifda		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Padang/5 Februari 2004	f. Tanggal Lulus	: 26 Agustus 2026	
	b. Nama Orangtua	: Ahmad Siddiq Susi Yemita	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 4 Tahun	
	d. PK	: Hukum Pidana	i. IPK	: 3,74	
	e. No. BP	: 2210113159	j. Alamat	: Jl. Jeruk 3 No.8, Padang	

**PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Kejaksaan Negeri Padang)**

(Kamilaturrifda, 2210113159, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104 Halaman, 2026)

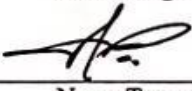
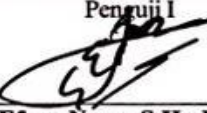
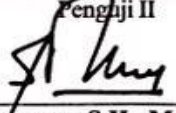
ABSTRAK

Pengembalian kerugian (*asset recovery*) merupakan salah satu tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilaksanakan melalui pembayaran uang pengganti, penyitaan aset, dan perampasan aset. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berwenang menjalankan peran tersebut agar kerugian negara dapat dipulihkan. Dalam praktiknya pengembalian kerugian keuangan negara belum sepenuhnya optimal karena menghadapi berbagai kendala. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang? (2) Apakah kendala yang dihadapi penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi? (3) Apakah upaya yang dilakukan penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang narasumbernya merupakan pihak dari Kejaksaan Negeri Padang dan narapidana korupsi. Penelitian ini difokuskan pada 3 kasus dari 3 tahun terakhir yaitu kasus tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan kerugian negara mencapai Rp3.129.885.162 yang mana kerugian yang berhasil dipulihkan berjumlah Rp1.449.955.500. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara berjalan optimal pada tahun 2023 karena kesediaan terpidana membayar secara sukarela. Berbeda dengan tahun 2024 yang melakukan pembayaran secara sukarela pada tahap penyidikan, namun tidak dapat membayar kewajiban yang telah ditetapkan pada putusan pengadilan yang telah inkrah. Sedangkan pada tahun 2025 pembayaran kerugian hanya dapat dilakukan sebagian, untuk memaksimalkan pemulihan tahun 2024 dan 2025 dilakukannya penyitaan dan perampasan, namun tidak dapat menutupi kewajiban yang telah dijatuhkan. Adapun yang menjadi kendala tidak optimalnya pelaksanaan pengembalian tersebut meliputi menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi, sulitnya pelacakan aset, dan perlawanan hukum dari pelaku. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Padang melakukan penelusuran dan pelacakan aset melalui pendekatan *follow the money* dengan bekerja sama dengan para ahli serta menempuh upaya hukum demi kelanjutan penegakan hukum.

Kata Kunci: Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Asset Recovery

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 26 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	Efren Nova, S.H., M.H.	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Kamilaturrifda	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang / February 5 th 2004	f. Graduation Date : August 26 th , 2026	
	b. Parents' Name : Ahmad Siddiq Susi Yemita	g. Pass Predicate : Cumlaude	
	c. Faculty : Law	h. Length of Study : 4 years	
	d. Concentration : Criminal Law	i. GPA : 3,74	
	e. Student ID : 2210113159	j. Address : Belimbing, Padang	

THE IMPLEMENTATION OF STATE FINANCIAL LOSS RECOVERY IN CORRUPTION

(Case Study at The Padang District Attorney's Office)

(Kamilaturrifda, 2210113159, Faculty of Law, Andalas University, 104 Pages, 2026)

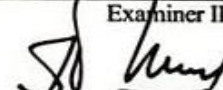
ABSTRACT

The recovery of state losses (asset recovery) is one of the primary objectives in combating criminal acts of corruption, which can be carried out through the payment of compensation money (uang pengganti), the confiscation of assets, and the forfeiture of assets. The Prosecutor's Office, as one of the law enforcement institutions with the authority to do so, carries out this role so that state financial losses can be recovered. In practice, however, the recovery of state financial losses has not been fully optimal due to various obstacles encountered. The problems formulated in this research are: (1) How is the implementation of the recovery of state financial losses in criminal acts of corruption carried out at the Padang District Prosecutor's Office? (2) What obstacles are faced by law enforcement officers at the Padang District Prosecutor's Office in implementing the recovery of state financial losses in criminal acts of corruption? (3) What efforts are made by law enforcement officers at the Padang District Prosecutor's Office to overcome the obstacles in implementing the recovery of state financial losses in criminal acts of corruption? This research employs a socio-juridical approach, is descriptive-analytical in nature, and is classified as empirical legal research. Data collection techniques were carried out through document studies and interviews with sources from the Padang District Prosecutor's Office and a convicted corruption offender. This research focuses on 3 cases from the last 3 years, namely the cases of 2023, 2024, and 2025, with state losses reaching Rp3,129,885,162 of which the amount successfully recovered totaled Rp1,449,955.. The results of the research indicate that the recovery of state losses proceeded optimally in 2023 due to the convicted party's willingness to pay voluntarily. This differs from 2024, in which voluntary payment was made during the investigation stage, yet the obligation established in the court's legally binding (inkracht) decision could not be fulfilled. Meanwhile, in 2025, payment of the loss could only be made partially; to maximize recovery in 2024 and 2025, confiscation and forfeiture were carried out, but these were unable to cover the obligations that had been imposed. The obstacles causing the implementation of such recovery to be less than optimal include the concealment of assets derived from criminal acts of corruption, the difficulty of tracing assets, and legal resistance from the perpetrators. To overcome these obstacles, the Padang District Prosecutor's Office conducted asset tracing through a follow-the-money approach in cooperation with experts, as well as pursued legal remedies for the continuation of law enforcement.

Keywords: *Recovery of State Financial Losses, Corruption Crime, Asset Recovery*

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 26th, 2026.

Examiner,

Signature		Examiner I		Examiner II
Name		Efren Nova, S.H., M.H.		Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: